

Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan PERMENPAN-RB No 59 Tahun 2020

Diyani Anjani

¹Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi dan Informasi Kampus Daerah Purwakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Alamat Jl. Veteran No.8 Purwakarta Telp dan Fax. (0264) 200395; e-mail:diyananjani@upi.edu

(Received: November 2022, Revised : Januari 2023, Accepted : April 2023)

Abstract— The current administration of government processes focuses a lot on the use of technology and information, especially in providing electronic services to improve services so that they are fast, efficient, and comfortable, in which case the issuance of PERPRES Regulation Number 95/20118 concerning SPBE. In 2021 the City of Tasikmalaya gets an SPBE index value of 2.68 with the smallest value in the SPBE Management domain, the purpose of this study is to evaluate the SPBE Management domain, with 2 aspects and 11 indicators based on PERMENPAN guidelines Number 59 of 2020. Assessment is carried out using the Qualitative method by conducting surveys and interviews with employees within the scope of the Tasikmalaya City Communication and Information Service and attached with supporting evidence. The results of this study show that the Tasikmalaya City government in 2022 in the SPBE Management domain gets a domain index value of 2.28, indicators that are classified as low in this study are recommendations for the Tasikmalaya City government in the future.

Keyword: SPBE Management, Electronic Based Government System (SPBE), PERMENPAN, Evaluation.

Intisari— Penyelenggaraan proses pemerintahan saat ini banyak terfokus pada pemanfaatan bidang teknologi dan informasi terutama dalam memberikan pelayanan elektronik untuk meningkatkan pelayanan agar cepat, efisien, dan nyaman, dalam hal itu dikeluarkan Peraturan PERPRES Nomor 95/20118 tentang SPBE. Pada tahun 2021 Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai indeks SPBE 2,68 dengan nilai terkecil pada domain Manajemen SPBE, tujuan dari penelitian ini untuk melakukan evaluasi pada domain Manajemen SPBE, dengan 2 aspek dan 11 indikator berdasarkan panduan PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif dengan melakukan survey dan wawancara kepada para pegawai di ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya serta dilampirkan dengan bukti pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 pada domain Manajemen SPBE mendapatkan nilai indeks domain sebesar 2,28, indikator-indikator yang tergolong rendah dalam penelitian ini menjadi rekomendasi untuk pemerintah Kota Tasikmalaya kedepannya.

Kata Kunci: Manajemen SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), PERMENPAN, Evaluasi

I. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya TI (Teknologi Informasi) pemerintah harus bisa memanfaatkan keadaan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah melakukan

perkembangan pelayanan publik melalui kebijakan e-government untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam mewujudkan proses kinerja tepat, cepat, dan akurat[6]. Beriringan dengan hal tersebut pemerintah menetapkan adanya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pelaksanaannya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam memberikan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kemenkominfo). Tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselarasan dan efisiensi SPBE agar dapat dikelola. Agar SPBE berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 mengenai evaluasi SPBE yang penilaian didalamnya mencakup 4 Domain, 8 Aspek, dan 47 indikator (PANRB).

Pada tahun 2021 hasil LHE (Laporan Hasil Evaluasi) SPBE di Kota Tasikmalaya mendapatkan predikat baik dalam penerapannya dengan perolehan nilai indeks 2,68. Dalam hasil evaluasi mendapatkan masih perlu pengembangan dalam berbagai aspek khususnya mengenai aspek audit TIK yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa pedoman audit dari auditor TIK internal Pemerintahan Daerah. Hal itu menunjukkan domain manajemen SPBE masuk ke dalam predikat terkecil.

Evaluasi SPBE sendiri dilakukan secara berkala oleh Kementerian PAN-RB melalui halaman monep.spbe.go.id. berbagai analisis Evaluasi SPBE telah dilakukan, penelitian ini dilakukan di Surabaya [4] dengan menganalisis 4 domain dengan panduan PERMEN PAN-

RB Nomor 59/2020, lalu penelitian yang menganalisis 3 domain berdasarkan peraturan PAN-RB Nomor 5/2018 dilakukan di Gorontalo [6]; Jawa Timur [2], adapun penelitian di Yogyakarta dengan menganalisis manajemen SPBE dengan panduan PERMENPAN-RB Nomor 59/2020 [3], dan penelitian mengenai layanan SPBE dilakukan di Sumbawa [7]; Banjar [1] dengan panduan PAN-RB Nomor 5/2018. Dalam penelitian-penelitian ini di atas masih kurang terfokus pada 1 domain yang terdiri dari beberapa aspek dan indikator yang harus lebih digali secara spesifik agar bisa menggali permasalahan serta memberikan rekomendasi/saran pada pemerintahan agar dapat meningkatkan nilai indeks aspek khususnya dalam manajemen SPBE. Domain manajemen SPBE di Kota Tasikmalaya tergolong masih rendah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi manajemen SPBE di Kota Tasikmalaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik) merupakan bentuk penyelenggaraan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peraturan Presiden No 95/2018 dijelaskan tentang pelaksanaan SPBE yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel[11]. Pada SPBE terdapat 4 domain yang dibagi kedalam 8 aspek bagian, dan terdiri dari 47 Indikator penilaian.

B. Peraturan MENPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) pada tahun 2018 telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan evaluasi SPBE melalui PERMANPAN-RB NO 5/2018. PERMANPAN dilaksanakan agar pelaksanaan SPBE dapat terpantau sehingga dapat mengukur kemajuan. Namun, seiring berjalannya waktu dengan pengembangan SPBE MENPAN-RB mengeluarkan PERMENPAN-RB No 59/2020 tentang pelaksanaan evaluasi SPBE dan penambahan domain baru yaitu manajemen SPBE[9].

C. Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Dalam pengelolaan SPBE terdapat 4 Domain yang dimana penilaian tingkat kematangannya dibagi menjadi 2 golongan[9] yaitu:

- Kematangan Kapabilitas prose : mencakup penilaian kematangan dari domain kebijakan, domain tata kelola, dan domain manajemen SPBE.
- Kematangan kapabilitass layanan : mencakup prngukuran kematangan dari layanan SPBE.

D. Indeks aspek SPBE

Nilai Indeks Aspek Adalah nilai tingkat kematangan penerapan SPBE yang dihitung dari perkalian tingkat kematangan indikator dengan nilai bobot relatif pada indikator[9]. Rumus perhitungan indeks sebagai berikut :

$$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

Keterangan :

Indeks Aspek_i : Nilai Indeks aspek ke-i;

BA_i : Nilai bobot aspek ke-i;

NI_{ij} : Nilai Tingkat Kematangan Indikator ke-j pada aspek ke-i;

BI_{ij} : Nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i ;

E. Indeks SPBE

Nilai Indeks Domain adalah nilai tingkat kematangan pada suatu domain. Penilaian indeks SPBE ini merupakan penilaian menyeluruh nilai domain[9]. Nilai domain dihitung dengan dengan rumus sebagai berikut :

$$Indeks SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

Keterangan :

Indeks Domain_i : nilai indeks domain ke-i;

BD_i : nilai bobot domain ke-i;

NA_{ij} : nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;

BA_{ij} : nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian proses yang mengatur alur penelitian agar dilakukan secara teratur, terarah, dan terkendali [8]. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pada bulan November 2022 di DISKOMINFO Kota Tasikmalaya dengan mengacu pada pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020[9].

J. Survey Kondisi Domain Manajement SPBE

Survey kondisi domain Manajemen SPBE merupakan tahap awal dalam penelitian agar mengetahui kondisi domain tersebut dan mengumpulkan data untuk dijadikan bahan penelitian.

K. Studi Literatur

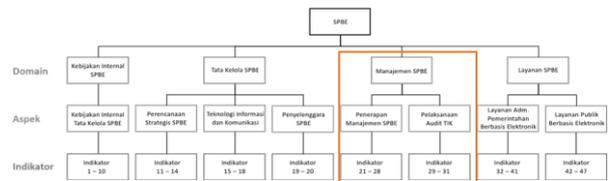
Studi Literatur adalah tahap pengumpulan informasi dari berbagai sumber dalam mencari teori mendasar dan teori pendukung yang akan digunakan untuk acuan penelitian[3]. sumber informasi didapat dari penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, peraturan pemerintah, jurnal, dan penilaian tingkat kematangan yang relevan dengan penilaian evaluasi SPBE.

L. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan mengikuti pedoman PERMENPAN RB NO 59 Tahun 2020 dengan metode sebagai berikut :

- Penilaian Wawancara, penilaian wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian sebagai klarifikasi pada penelitian yang dilakukan. Sampel yang dipilih adalah staf Diskominfo Kota Tasikmalaya karna yang berkaitan langsung dengan kriteria penilaian Manajement SPBE.
- Penilaian Visitasi, penilaian visitasi dilakukan dengan pengamatan pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk validasi setelah penilaian wawancara. Penilaian Visitasi merupakan pengumpulan data sampel dari proses tanya jawab dengan mengunjungi unit kerja terkait.

M. Pemetaan Proses Bisnis



Gambar 1 Kerangka SPBE

Sistem Pemerintah Berbasis elektronik (SPBE) didalamnya terdapat 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator[9], sebagaimana dengan rincian pada tabel 1. Pada penelitian ini akan terfokus pada domain 3 yaitu manajemen SPBE.

Aspek 5 - Manajement SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajement Layanan SPBE
Aspek 6 - Pelaksanaan Audit	
indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Table 1 Instrumen Penilaian Evaluasi SPBE 1

Pemetaan proses bisnis pada domain Manajemen SPBE mencakup 11 Indikator, dan dua aspek sebagaimana dengan rincian indikator pada Tabel 1. Untuk menentukan tingkat kematangan prosesnya dilakukan dengan mengidentifikasi indikator-indikator yang sudah berjalan yang kemudian dilakukan pengelompokan penilaian indikator evaluasi SPBE sesuai MENPANRB NO.59 Tahun 2020[4] dengan menggunakan rimus perhitungan nilai indeks aspek, kemudian sampai perhitungan indeks domain. Setelah dihasilkan data berupa angka dilakukan

pendekatan dengan metode kualitatif yang kemudian hasil tersebut diperhitungkan berdasarkan bobot domain pada aspek sebagaimana untuk bobot Domain Manajemen SPBE terdapat pada tabel dibawah.

Domain 3 – Manajemen SPBE		
Nama Aspek	Jumlah Indikator	Bobot
Aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE)	8	12%
Aspek 6 (Audit TIK)	3	4,5 %
Total	11	16,5 %

Table 2 Bobot Asspek

Setelah didapatkan nilai dari hasil perhitungan maka nilai indeks dapat diinterpretasikan ke dalam predikat seperti pada tabel dibawah :

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	< 1,8	Kurang
2.	1,8 - < 2,6	Cukup
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
5.	4,2 – 5,0	Memuaskan

Table 3 Predikat Nilai Indeks

N. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyusun data agar mudah untuk dipahami[10]. Analisis data ini merupakan rekapitulasi hasil penilaian tingkat kematangan Manajemen SPBE yang dilakukan sebelumnya. Penilaian tingkat kematangan manajemen SPBE masuk kedalam kategori tingkat kematangan kapabilitas proses yang sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tingkat	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses kebijakan internal pemerintahan masih dalam tahap konsep atau rancangan. Proses manajemen SPBE dilakukan dengan aturan dan panduan yang tidak jelas. Selain itu proses didalamnya tidak terorganisasi dengan baik serta hasilnya tidak dapat diprediksi.
2 – Terkelola	Memenuhi kriteria tingkat Rintisan Proses manajemen SPBE telah terlegalisasi, dengan peraturan yang masih sektoral atau bersifat parsial. Pelaksanaan proses manajemen SPBE sudah terorganisasi. Namun,

	pelaksanaannya berdasarkan pemahaman tanoa pedoman yang baku.
3 – Terdefinisi	Sudah memenuhi kriteria tingkat Terkelola Proses manajemen SPBE telah dilakukan pedoman yang menyeluruh untuk semua unit kerja dan sudah lingkup substansi yang lengkap. Namun, keterpaduan antar unit kerja belum diatur. Pelaksanaan proses manajemen SPBE sudah terorganisasi. Namun, keterpaduan antar unit kerja belum diatur.
4 – Terpadu dan Terukur	Sudah memenuhi kriteria tingkat Terdefinisi Keterpaduan antar unit kerja sudah diatur serta sewaktu waktu dilakukan evaluasi dan reuiu untuk perkembangan serta perubahan undang-undang, teknologi, eksternal, dan lingkungan. Proses instansi pemerintahan telah dilaksanakan dengan kolaboratif. Penerapannya telah dikelola dan menghasilkan proses kinerja secara kuantitatif melalui evaluasi dan reuiu berkala.
5 – Optimum	Sudah memenuhi kriteria tingkat Terpadu dan terukur Kebijakan internal pemerintahan telah melakukan revisi sebagai tindak lanjut dari evaluasi dan reuiu kebijakan dalam mengatur pengelolaan perubahan. Telah melakukan peningkatan kualitas berdasarkan hasil evaluasi dan reuiu. Peningkatan proses manajemen SPBE dilakukan penerapan manajemen perubahan.

Table 4 Kriteria Tingkat Kapabilitas

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dilakukan ini berfokus pada tingkat kematangan kapabilitas proses manajemen SPBE yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kota Tasikmalaya dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Proses analisis terdiri dari :

A. Nilai Tingkat kematangan dan Data pendukung

No	Indikator	Tingkat Kemata-ngan	Data Dukung
Aspek Manajemen SPBE			
1.	Indikator 21	2	Perwal 34/2016 Peningkatan efektifitas Penerapan Manajemen Lampiran penetapan risiko pengawasan

			Peta Resiko Inspektorat SK penetapan risiko pengawasan
2.	Indikator 22	2	Audit sarana Hasil pentest Ekinerja Hasil pentest JDIH Hasil Pentest Portal Hasil Pentest Simpeg Hasil Pentest Sipentas Sistem Pengamanan Pusat Data Perwalkot 101/2020 Penyelenggaraan SPBE SK Kepala dinas mengenai Tim pengelola TIK dan SOP pengelolaan data center
3.	Indikator 23	3	Open data kota Tasikmalaya Perwal No 102/2020 Satu data kota Tasikmalaya Form permintaan data bidang Perindag Penggunaan sistem peenghubung intergrasi (Aplikasi Smart Kelurahan) Perwalkot 101/2020 Penyelenggaraan SPBE SK forum data informasi pembangunan Perwalkot 79/2021, pasal 34 manajemen Data Perwalkot 79/2021 untuk merubah Perwal 101/2020
4.	Indikator 24	4	BA Rekonsiliasi BMD DISKOMINFO Perda no 13 Pengelolaan barang milik daerah Rekap rencana umum pengadaan jaringan Perkap rencana umum pengadaan DNS server Rekap rencana umum pengadaan server KIB 2020 Kominfo penggunaan aset Lampiran SK penghapusan Aset Laporan hasil Reviu LKPD 2020 Sk 030/KEP/1057/2019 BPKAD mengenai Penghapusan aset. Laporan hasil reviu BMD 2021.
5.	Indikator 25	2	Data PNS

			Hasil assessment pejabat pengawas 2021 Hasil ujkikom staf CAT BKN Perwalkot 44/2019 manajemen karir PNS Peja jabatan wali Kota Tasikmalaya Laporan penyusunan ANJAB Keputusan wali Kota Tasikmalaya tentang AKPK
6.	Indikator 26	2	Daftar hadir bimtek SmartKelurahan Daftar hadir SRIKANDI Manajemen pengetahuan Perwalkot 101/2020 penyelenggaraan SPBE
7.	Indikator 27	2	Perwalkot 101/2020 pasal 41 manajemen perubahan Perwalkot 101/2020 penyelenggaraan SPBE Rencana umum pengadaan Perwalkot 79/2021 pasa; 41 manajemen perubahan Perwal 79/2021 perubahan perwal 101/2020
8.	Indikator 28	3	Managemen layanan SPBE Aplikasi ITSM Perwalkot 101/2020 pasal 42 manajemen layanan SPBE Perwalkot 101/2020 penyelenggaraan SPBE RENJA dishubkominfo 2017 TSC users aplikasi ITSM Wathsapp group touble shooting infrastruktur TIK PKA ITSM 2017
Aspek Audit TIK			
10.	Indikator 29	1	Audit Security RENJA Diskominfo 2017 RKA Audit TIK 2017
11.	Indikator 30	2	Hasil pentest Ekinerja Hasil pentest Godok Hasil pentest JDIH Hasil Pentest Portal Hasil Pentest Simpeg Hasil Pentest Sipentas Perwalkot 101/2020 pasal 44 audit TIK PERWALKOT 101/2020

			penyelenggaraan SPBE
12.	Indikator 31	2	Audit Security Hasil pentest Ekinerja Hasil pentest Godok Hasil pentest JDIH Hasil Pentest Portal Hasil Pentest Simpeg Hasil Pentest Sipentas PERWALKOT 101/2020 Pasal 44 Audit TIK Renja Dishubkominfo 2017 PKA Audit TIK 2017

Table 5 Data Tingkat Kematangan dan Bukti Pendukung

B. Perhitungan Nilai Indeks Aspek

Pada manajemen SPBE terdapat dua aspek yaitu Penerapan Manajemen dan Audit TIK yang masing-masing indikatornya mempunyai bobot sebesar 1,5. Kedua aspek tersebut dihitung sebagai berikut :

Indikator	Nilai indikator (NI)	Bobot Indikator (BI)(%)	NI X BI
Aspek Penerapan Manajemen SPBE = BA (bobot Aspek) 12			
Indikator 21	2	1,5	3
Indikator 22	2	1,5	3
Indikator 23	3	1,5	4,5
Indikator 24	4	1,5	6
Indikator 25	2	1,5	3
Indikator 26	2	1,5	3
Indikator 27	2	1,5	3
Indikator 28	3	1,5	4,5
Jumlah nilai indikator x Bobot indikator =			30
Indeks aspek 5 SPBE = 1/BA x Jumlah nilai indikator x Bobot indikator			2,5
Aspek Audit TIK BA (Bobot Aspek) 4,5			
Indikator 29	1	1,5	1,5
Indikator 30	2	1,5	3
Indikator 31	2	1,5	3
Jumlah nilai indikator x Bobot indikator =			7,5
Indeks aspek 5 SPBE = 1/BA x Jumlah nilai indikator x Bobot indikator			1,67

Table 6 Nilai Indeks Aspek

C. Perhitungan Nilai Indeks Domain

Setelah diketahui nilai aspek manajemen SPBE kemudian dilakukan perhitungan dengan nilai indeks domain manajemen SPBE seperti pada tabel di bawah :

Domain Manajemen SPBE : nilai bobot 16,5			
Aspek	Nilai Indeks Aspek	Bobot Aspek (%)	NA X BA (%)
Aspek 5	2,5	12	30
Aspek 6	1,67	4,5	7,5
Jumlah nilai aspek x Bobot aspek =			37,7
Indeks Domain 3 SPBE =			2,28

Table 7 Nilai Indeks Domain

Hasil dari perhitungan nilai domain manajemen SPBE mendapat nilai 2,28 yang dimana nilai tersebut masuk ke dalam predikat “BAIK”.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil visitasi di Dinas Komunikasi dan informatika kota Tasikmalaya serta OPD terkait mengenai tingkat kematangan manajemen SPBE dengan dilakukannya observasi dan wawancara mendapatkan nilai indeks domain sebesar 2,28 dengan predikat “Baik”. tentunya nilai tersebut masih tergolong kurang apabila dilihat dari nilai maksimal yaitu 5. Penyebab masih kurangnya tingkat kematangan adalah nilai aspek yang masih tergolong rendah yang dimana menunjukkan penerapannya belum maksimal dan kurang dikembangkan.

Dari hasil analisis tingkat kematangan kapabilitas proses manajemen SPBE masuk dalam tingkat 3 – Terpadu dan Terukur, dapat dilihat dalam rincian data pendukung kota tasikmalaya telah melakukan proses penerapan SPBE secara terpadu pada kontribusi kinerja organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan kegiatan reuiu serta evaluasi dalam proses SPBE dan tentunya masih perlu pengembangan.

C. Rekomendasi

Tahap akhir dalam proses analisis adalah menyusun rekomendasi untuk setiap indikator. Tujuan rekomendasi adalah agar penerapan SPBE dapat lebih baik. rekomendasi yang diberikan antara lain :

Indikator	Rekomendasi
Indikator 21	Pelaksanaan manajemen resiko perlu mengikuti pedoman SPBE serta perlunya reuiu agar bisa melakukan perbaikan dan pengembangan.

Indikator 22	Pengendalian keamanan informasi perlu dikembangkan dan melakukan perbaikan dalam penerapan serta penyesuaian.
Indikator 23	Sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala agar dapat diperbaiki dan termutakhir.
Indikator 24	Perlunya melakukan evaluasi secara berkala pada pemerintahan kota Tasikmalaya dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi.
Indikator 25	Perekrutan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta memberikan pelatihan atau pendidikan mengenai pelaksanaan SPBE pada SDM yang sudah ada.
Indikator 26	Sebaiknya sebelum melaksanakan kegiatan materi yang akan dibahas di share terlebih dahulu untuk dipahami, kemudian disediakan aplikasi agar bisa mengakses materi.
Indikator 27	Manajemen perubahan harus dilakukan secara terencana, kemudian perlu melakukan evaluasi dalam penerapannya, dan perlunya bertindak tegas dalam melakukan perubahan.
Indikator 28	Pelaksanaan manajemen layanan SPBE baiknya segera melakukan evaluasi dan segera dilakukan perkembangan dalam pelayanannya.
indikator 29	Untuk tim audit segera didaftarkan permohonannya pada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Indikator 30	Kegiatan pelaksanaan audit harus melibatkan auditor TIK internal Pemerintahan Daerah dan mengajukan permohonan pelaksanaan pada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Indikator 31	Tingkat keamanan SPBE baiknya bekerjasama langsung dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menjamin keamanannya.

Table 8 Rekomendasi untuk setiap indikator

Terlepas dari validasi yang telah dilakukan, masih ada keterbatasan dari penelitian yang harus diperhatikan. Data diperoleh dari internal Diskominfo Kota Tasikmalaya dengan metode observasi serta wawancara. Melaksanakan observasi dan wawancara dengan bagian pemerintahan lain diperlukan agar mendapatkan rekomendasi yang lebih baik lagi serta mampu mengatasi persoalan lain yang ada di bagian pemerintahan.

V. KESIMPULAN

Pada hasil dari analisis kapabilitas proses pada manajemen SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tasikmalaya didapatkan nilai domain manajemen SPBE sebesar 2,28 dengan predikat "BAIK", dengan rincian nilai aspek penerapan manajemen SPBE 2,5, dan aspek Audit TIK 1,67. Dengan hasil tersebut nilai kapabilitas proses masuk pada tingkat 3 yaitu Terpadu dan Terukur.

Dalam pengembangan SPBE di kota Tasikmalaya diperlukan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang

diperlukan. Proses pelaksanaan SPBE sendiri masih berdasarkan pengalaman dan beberapa indikator dilakukan tanpa mengikuti panduan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. .

Mengingat penerapan SPBE pada domain manajemen SPBE masih tergolong rendah. Maka pemberdayaan dan pengembangan sumber daya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim asesor SPBE. beberapa alternatif solusi yang disajikan antara lain :

- Komitmen, dengan meningkatkan kesadaran dari setiap pimpinan instansi mengenai kebijakan dalam penerapan SPBE.
- Tata Kelola, kebijakan tata kelola harus menjadi pedoman dalam penerapan SPBE di setiap Instansi daerah.
- Anggaran belanja TIK, memaksimalkan strategi perencanaan dengan anggaran belanja yang efektif dan efisien.
- Literas, perlunya pengembangan SDM dengan meningkatkan literasi khususnya di instansi OPD – OPD terkait.
- Kolaborasi internal, menjalin kerjasama antar perangkat daerah dengan membentuk tim koordinasi.
- Kolaborasi eksternal, menjalin koordinasi melalui forum antar instansi pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Saputra, M. R. Y., Winarno, W. W., & Henderi, H. (2020). EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SPBE DI DISPERINDAG KABUPATEN BANJAR. *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 3(1), 7-13.
- [2] Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15(1), 22-33.
- [3] Putra, D. S., Selo, S., & Fauziati, S. (2022). EVALUASIDOMAIN MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 59 TAHUN 2020. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 5(1), 54-61.
- [4] Nabilah, A. (2021). Evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- [5] Sukarsa, I. M., Paramartha, I. B. A., Cahyawan, A. A. K. A., Wibawa, K. S., Yasa, P. G. A. S., Wulanyani, N. M. S., & Wisswani, N. W. (2020). Evaluation of E-government maturity models in sub-district public services in Indonesia using the SPBE framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 243-253.
- [6] Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo) the Evaluation of Electronic Based Government System Using E-Government Maturity Model. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1), 16-24.
- [7] Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN*, 2548, 964X.
- [8] Prof. Sukardi, Ph.D. 2015. "Metodologi Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas: Implementasi dan Pengembangannya". Cetakan ke-3. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2020. "Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". Nomor 59 Tahun 2020.
- [10] Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis. USUpress.
- [11] Peraturan Presiden. 2018. "Peraturam Presiden (PERPRES) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik". Nomor 95 Tahun 2018.